

**JURNAL**

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO**

**DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL**

**NARAPIDANA YANG TERIKAT PERKAWINAN**



**Diajukan Oleh :**

**NICOLAUS BELA MARZELO NEGRAO**

**NPM : 110510538**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**

**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**



**Diajukan Oleh :**

**NICOLAUS BELA MARZELO NEGRAO**

**NPM : 110510538**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 24 Juni 2015**

**ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan : .....**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**F. Andro Susilo, S.H. LL.M.**

- I. Judul** : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana yang Terikat Perkawinan
- II. Nama** : Nicolaus Bela Marzelo Negrao, ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

Humans have various kinds of needs in living life. In theory according to Abraham Maslow's Pyramid of Needs, human needs are sorted by degree of fulfillment. On the theory, the basis of humans needs is physiological need which in this case includes sexual needs. Inmates as someone who had lost their independence can not satisfy their sexual needs. Due to unfulfilled sexual needs, Inmates could trigger counter-productive activities such as masturbation, sexual perversion and even sodomy due to their sexual needs and desires are not conveyed. Therefore this law research will examine The Efforts of Purwokerto Penitentiary to Fulfill The Inmates Sexual Needs Who Have Marriage Bounds. This law research not only to examine the efforts of Purwokerto Penitentiary to fulfill the inmates sexual needs who have marriage bounds, but also to find out the constraints in fulfilling the sexual needs of inmates who have marriage bounds. This law research using normative law research. The result of this study disclose that in fulfilling the sexual needs of inmates who have marriage bounds, Penitentiary in Purwokerto using physical development, personality and work coaching that useful to build inmates character and mental also distributed their sexual desire into things that are positive. To fulfill the sexual needs of inmates who are bound marriage, Penitentiary in Purwokerto have constraints with sport facilities which limited and the number of coaches is not ideal with the number of inmates.

*Keywords: pyramid theory of needs, physiological needs, sexual needs, Penitentiary, inmates.*

## **BAB I :        PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam menjalani kehidupannya, banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan tendensi untuk mencapai tujuan-tujuan personal yang membuat kehidupan bagi individu yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan.

Berkaitan dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow seorang psikolog Amerika mengatakan :

“Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan lain muncul menuntut pemuasan. Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis”<sup>1</sup>.

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (*physiological needs*), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan fisiologis dan merupakan kebutuhan dasar menurut Teori Piramida Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu, dan jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan maka individu tidak akan tergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

---

<sup>1</sup> E. Koeswara, 1991, *Teori-teori Kepribadian*, Cetakan kedua, PT. Eresco, Bandung, hlm.118.

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bagi Narapidana yang telah berstatus kawin, hal ini penting, mengingat Narapidana yang memiliki ikatan perkawinan sebelum menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan hubungan seksual dengan istrinya guna memenuhi kebutuhan seksual sebagai kebutuhan fisiologisnya.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan ini justru bisa saja tidak tercapai apabila Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang merupakan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan ?
2. Apa kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan ?

## C. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup>

Serta di dukung dengan Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

## **BAB II : PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO DALAM MENGALIHKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA YANG TERIKAT PERKAWINAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam sejarahnya, pidana penjara di Indonesia secara institusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement* 1917 No. 708). Peraturan kepenjaraan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS 1915), khususnya pasal 10 KUHP. Fakta menunjukkan bahwa peraturan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

kepenjaraan tetap menggambarkan kesan kolonial dengan bangunan penjaranya, oleh karena itu sering dikatakan bahwa perlakuan petugas atau sipir dan metode pembinaannya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hingga pada 5 Juli 1963 Sahardjo mengemukakan ide tentang pemasyarakatan yang terangkum dalam :

1. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan mempunyai mata pencaharian.<sup>3</sup>

Ide Pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo menjadi titik balik dalam dunia kepenjaraan Indonesia yang kemudian dilanjutkan pada 27 April 1964 dengan diadakannya konferensi dinas kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia di Lembang, Bandung. Hasil dari konferensi ini telah menetapkan 10 prinsip pokok, yaitu :

1. Orang tersesat diayomi.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam.
3. Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk
5. Kepada Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan tidak boleh sekedar mengisi waktu
7. Bimbingan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan Lembaga Pemasyarakatan baru.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta Liberty, Yogyakarta, hlm. 176.

<sup>4</sup> Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.37.



## **B. Tinjauan Umum Terhadap Narapidana**

Narapidana merupakan orang yang telah membuktikan kegagalannya mentaati kaidah-kaidah pergaulan dalam masyarakat. Kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor pergaulan dalam hubungan kemasyarakatan yang timbul dari ketidakserasian dalam organisasi masyarakat atau dari perubahan nilai-nilai dan kaidah dalam masyarakat. Diakui, bahwa ada juga faktor-faktor penyebab yang bersumberkan pada pribadi orangnya yang bersifat biologis-luas, baik didapati setelah lahir maupun diwarisi, tetapi perannya tidak sebesar faktor pergaulan tersebut di atas, dengan arti dalam bagian besar pelanggaran hukum faktor sosiallah yang dominan. Memang kegagalan dalam penyesuaian diri pada tuntutan masyarakat, yang banyak terwujud dalam tindak pidana, adalah akibat dari jaringan berbelit-belit, sebab-musabab, timbal balik yang ruwet dan rumit dari faktor-faktor sosial dan pribadi seseorang dengan kemampuannya untuk penyesuaian.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. C.I Harsono dalam bukunya menyebutkan bahwa Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman<sup>5</sup>. Pengertian Narapidana menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memiliki kesamaan dengan pengertian yang

---

<sup>5</sup> C.I Harsono, 1995, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm.4.



dikemukakan oleh C.I Harsono, kesamaan terletak pada kalimat yang menunjukkan bahwa Narapidana adalah sosok yang sedang menjalani hukuman, dalam hal ini adalah hukum pidana.

### **C. Tinjauan Terhadap Ikatan Perkawinan Berkaitan dengan Pemenuhan Kebutuhan Seksual**

#### **1. Tinjauan Terhadap Ikatan Perkawinan**

Kawin adalah perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan isteri; nikah, perkawinan adalah pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **2. Tinjauan Terhadap Kebutuhan Seksual**

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan pelampiasan dorongan seksual, bagi mereka yang sudah

matang fungsi biologisnya. Kebutuhan seksual bagi manusia sudah ada sejak lahir<sup>6</sup>. Dalam sebuah ikatan perkawinan, dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan seksual ini akan menjadi modal berharga bagi suami dan istri dalam membina dan mempertahankan biduk rumah tangga yang penuh romantika. Sejalan dengan pemikiran Abraham Maslow, Hasan Basri menyatakan :

“Apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang akan berakhir pada perceraian<sup>7</sup>”.

#### **D. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana yang Terikat Perkawinan**

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sariyani N A.Md.IP.S.Sos selaku KASUBSI BIMASWAT, Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana selama ini hanya melalui metode cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), serta cuti mengunjungi keluarga (CMK), karena dengan 3 program ini Narapidana dapat kembali ke rumah untuk bertemu kelaurga, terutama istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Selain pembebasan bersyarat dan cuti seperti yang dijelaskan di atas. Lemabaga Pemasyarakatan Purwokerto juga menerapkan berbagai program pembinaan, selain untuk membangun karakter, mental dan mempersiapkan Narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat

---

<sup>6</sup> Alimut Fesharah, 2006, *Seksualitas Dalam Psikologi*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.21.

<sup>7</sup> Hasan Basri, 1995, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 76.

juga untuk mengisi waktu luang Narapidana, sehingga mengalihkan hasrat seksual mereka ke hal-hal yang lebih produktif.

Program pembinaan bagi Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto antara lain :

a. Pembinaan Keribadian

Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan adalah pembinaan rohani khususnya Islam dan Kristen. Untuk yang beragama Islam pembinaan rohani dilaksanakan dari hari Senin hingga Sabtu bertempat di masjid At Taubah Lapas, berupa baca tulis Alquran, Akidah Ahlaq, Tauhid dilaksanakan setiap hari mulai jam 08.00 hingga jam 10.00, dibimbing oleh petugas Bimpas dan pada hari tertentu ( Senin, Rabu dan Sabtu) mendatangkan penceramah/Da'i dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Pondok Pesantren Ubay bin Kaab Purwokerto, STAIN Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan dari yayasan Al Irsyad al Islmiyah Purwokerto serta mubaligh sekitar Lapas. Untuk yang beragama Kristen pembinaan rohani berupa kebaktian dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu bertempat di aula yang dibimbing dari Dewan Gereja Indonesia Purwokerto.

b. Pembinaan Jasmani

Untuk lebih meningkatkan kesehatan jasmani WBP Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, maka mulai tanggal 26 Februari 2013 , di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto rutin dilaksanakan Senam untuk seluruh WBP dengan mendatangkan

Instruktur senam dari Luar Lapas. Pelaksanaannya dilakukan rutin setiap hari Selasa dan Kamis dengan cara bergantian setiap harinya antara Tahanan dan Narapidana ( untuk Narapidana dibagi lagi pelaksanaannya yaitu Narapidana Blok Barat dan Narapidana Blok Timur ).

Selain program pembinaan kepribadian dan jasmani, Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto juga menerapkan program bimbingan kerja yang diharapkan selain mampu memberikan keterampilan bagi Narapidana ketika kemabali ke masyarakat nantinya, juga mampu mengisi waktu luang Narapidana sehingga mengalihkan hasrat seksual mereka ke arah yang lebih positif dan produktif.

#### **E. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan**

Kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai hak Narapidana, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan seksual mereka, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto menghadapi jalan buntu karena tidak adanya peraturan teknis yang mengatur.

### **BAB III : PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan, yaitu meliputi :

a. Penggunaan hak cuti menjelang bebas (CMB)

Hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana bagi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap mampu untuk mengakomodir dan menyalurkan kebutuhan seksual dari Narapidana, karena dengan hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana dapat kembali ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, dalam hal ini dengan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, cuti menjelang bebas yang diberikan kepada Narapidana juga mampu mempercepat proses resosialisasi Narapidana dengan kehidupan bermasyarakat.

b. Program pembinaan kepribadian, jasmani dan latihan kerja

Program kepribadian, jasmani dan latihan kerja yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto diharapkan mampu untuk memberi kesibukan bagi Narapidana sehingga mampu menekan hasrat seksual mereka, disamping untuk menekan hasrat seksual Narapidana, program ini juga bertujuan untuk membina dan membekali Narapidana

dengan keahlian kerja sehingga mereka siap untuk kembali ditengah masyarakat..

2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan yaitu : Tidak adanya instruksi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir penulisan hukum/skripsi ini penulis memberikan saran : Perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis seperti mengenai pelaksanaan hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana dalam bentuk *conjugal visit* , terutama Narapidana yang memiliki ikatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Alimut Fesharah, 2006, *Seksualitas dalam Psikologi*, Refika Aditama, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Badan Pembinaan, Hukum Nasional, 1975, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta Liberty, Yogyakarta.

Boyke Dian Nugraha, 2009, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Bani Aksara, Jakarta.

C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta

E. Koeswara, 1991, *Teori-teori Kepribadian*, Cetakan Kedua, P.T Eresco, Bandung.

Hasan Basri, 1995, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

J.M Van Bemmelen, 2008, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasan, Bina Cipta, Bandung.

Lexi. J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T Rosadakkarya, Bandung.

Mr. R.A Koesnon, 1961, *Politik Pendjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.



O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Ahmad, S. Soemadi Pradja SH & Romli Atmasasmita SH, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Bina Cipta, Bandung.

Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 10 yang mengatur macam-macam sanksi pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 *Tentang* Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

#### **Internet :**

[www.detik.com](http://www.detik.com), Kasus Sodomi di LP Sudah Biasa, diakses pada 7 Maret 2015

[www.joglosemar.co](http://www.joglosemar.co), Urgensi Ruang Intim di Penjara, diakses pada 7 Maret 2015

**Kamus :**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta.

